

**PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, PAJAK HOTEL RESTORAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**I Nyoman Wahyu Widiana<sup>1</sup>  
I Ketut Suidiana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [wahyuwidiana94@gmail.com](mailto:wahyuwidiana94@gmail.com)

**ABSTRAK**

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam membangun aset tetap yang ditujukan pada pelayanan publik, sehingga dapat memaksimalkan produktivitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS Provinsi Bali, Dinas Pendapatan Bali dan Dinas Pariwisata Bali. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan analisis jalur atau *path analysis* untuk mengetahui pengaruh langsung serta uji sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap belanja modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel intervening dari jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran

**Kata kunci:** jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran, pendapatan asli daerah, belanja modal.

**ABSTRACT**

*Capital expenditure is the expenditure of local governments in building fixed assets at public service and then can maximize the productivity of the economy. This study to investigate the effect of direct and indirect number of tourist, tax of hotel and restaurant, and local revenues through capital expenditure. This research was conducted in all districts / cities in Bali. Data collection is through the documents contained in the BPS Bali Province, Bali Government Local Revenue Office and Bali Government Tourism Office. This study used secondary data with path analysis path analysis to determine the direct effect as sobel test to determine the effect is not immediate. The analysis showed that the number of tourist, tax of hotel and restaurant significant direct effect on the local revenues. Number of tourist, tax of hotel and restaurant and local revenue significant direct effect on the capital expenditure. Number of tourist and tax of hotel through local revenues significant indirect effect on the capital expenditure. Local revenue mean spending an intervening variable of number of tourist and tax of hotel and restaurant.*

**Keywords:** number of tourist, tax of hotel and restaurant, local revenue, capital expenditure

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan otonomi daerah ialah wewenang pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Andirfa (2009), menyatakan otonomi daerah bertujuan memaksimalkan pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan layanan publik. Malik et al. (2006), untuk meningkatkan pembangunan ekonomi diperlukan desentralisasi struktur fiskal yang efektif. Lin and Liu (2000), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan memberikan perubahan dalam perekonomian suatu daerah. Menurut Inuwa (2012), pengeluaran pemerintah, yakni belanja modal merupakan perangkat penting dalam mengendalikan suatu perekonomian. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam membangun aset tetap untuk pelayanan publik, sehingga akan memaksimalkan produktivitas perekonomian.

Kartika dan Dwirandra (2014), produktivitas masyarakat akan meningkat, jika daerah mempunyai layanan publik yang memadai yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah. Alokasi belanja modal akan membiayai aset tetap pemerintah daerah. Ketika pembangunan ekonomi daerah meningkat, belanja modal akan ditingkatkan untuk memperbaiki atau melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana agar pembangunan ekonomi tercapai dengan baik.

Abimanyu (2005), adanya berbagai sarana prasarana di daerah memiliki dampak dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika sarana prasarana memadai

dengan baik maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari – hari dengan aman dan nyaman yang nantinya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat itu sendiri. Investor juga nantinya akan melirik pada daerah yang memiliki infrastruktur, dengan kata lain turut mengembangkan potensial daerah tersebut. Dengan kata lain, belanja modal yang bertambah memiliki dampak panjang pada produktivitas, bertambahnya investor serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hariyanto dan Adi (2006), peningkatan pembangunan daerah tercipta dari ketersedianya infrastruktur yang baik di berbagai sektor. Wong (2004), pembangunan infrastruktur akan berdampak terhadap kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Semakin banyak belanja modal maka, produktivitas perekonomian akan semakin tinggi karena, belanja modal berupa infrastruktur berdampak pada pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Media Indonesia, 2008).

**Tabel 1**  
**Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**  
**periode 2009 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	100.666	58.163	67.493	134.613	142.563
Tabanan	77.334	107.905	70.442	138.723	128.186
Badung	445.014	176.302	199.704	627.705	766.712
Gianyar	160.249	109.959	124.148	120.627	185.323
Klungkung	82.507	42.555	49.010	81.223	64.093
Bangli	48.305	68.608	114.687	82.340	62.762
Karangasem	141.782	77.507	118.836	171.630	180.737

Buleleng	102.442	47.207	121.895	79.443	185.896
Denpasar	88.378	65.756	88.771	206.143	254.008

Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2009 – 2014

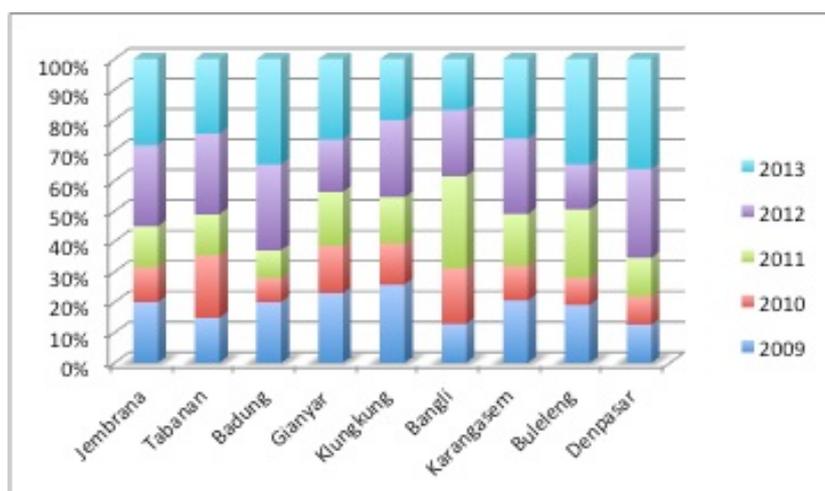
Tabel 1 menunjukkan belanja modal yang berfluktuasi selama lima tahun pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Realisasi belanja modal tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung, mengingat tingginya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Reaslisasi belanja modal Kabupaten Klungkung tahun 2010 terendah sebesar Rp 42.555 juta, karena konsumsi untuk kebutuhan publik terpenuhi tahun sebelumnya sebesar Rp 82.507 juta, belanja modal lebih rendah dengan selisih anggaran sebesar Rp 39.955 juta (selisih anggaran tahun 2009 dan 2010).

Menurut Erani Yustika, mengatakan belum adanya aturan pendanaan proporsi belanja modal, hal ini tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Erani menilai pengalokasian belanja modal yang rendah dibandingkan dengan belanja lainnya akan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat sebab, dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pendapatan perkapita, pemerintah semestinya memberi alokasi belanja modal yang lebih besar (OkeZone.com, 2012). Menurut Stine (1994), pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pelayanan publik bagi masyarakat daripada kepentingan lain yang tidak produktif demi kesejahteraan masyarakat.

Felix (2012), menilai alokasi belanja modal seharusnya lebih diutamakan daripada belanja lain yang tidak produktif, karena belanja modal merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Solikin

(2007), belanja modal sepenuhnya belum dapat menciptakan kesejahteraan publik, karena kurang terorientasinya pengelolaan belanja modal setiap daerah. Pemerintah Daerah nantinya diharapkan lebih selektif dan efisien dalam pengalokasian belanja modal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Gambar 1 merupakan data realisasi pengalokasian belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009 – 2013.

**Gambar 1**  
**Data Realisasi Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bali periode 2009 – 2013.**



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2009 – 2014

Gambar 1 menunjukkan pengalokasian belanja modal pada setiap daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Alokasi belanja modal perlu diperhatikan sebab, akan membantu meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2007), Pemerintah Daerah lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk belanja rutin tidak

produktif dibandingkan pelayanan publik. Dari 100% belanja daerah, belanja modal hanya sebesar 21,69% untuk pengadaan aset untuk investasi dan pelayanan publik. Alokasi belanja modal belum sepenuhnya terlaksana dalam kesejahteraan publik, hal ini karena masih adanya kepentingan golongan. Halim dan Abdullah (2006), menilai alokasi belanja modal tidak dapat berjalan dengan baik akibat masih adanya kepentingan golongan yang bermain didalamnya.

Mardiasmo (2002:46), meningkatnya belanja modal tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Peran PAD yakni memaksimalkan layanan publik serta turut memajukan perekonomian daerah. Menurut Koswara (2000), peningkatan PAD dapat mewujudkan kemandirian daerah dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Pemerintah Daerah berwenang dalam menggali serta mengelola potensi daerah demi membiayai pembangunan daerah. Jones dan Walker (2007), menyatakan jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah *revenue* pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur pembangunan pemerintah daerah.

Perkembangan industri pariwisata di Bali akan menggerakkan sektor-sektor terkait, dalam penerimaan pendapatan asli daerah. PAD di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menggali potensi sumber daya daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, sehingga menjadi daerah mandiri sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi

daerah. PAD pada masing-masing Kabupaten/Kota secara rinci dari periode 2009 – 2013 dijabarkan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**  
**periode 2009 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)**

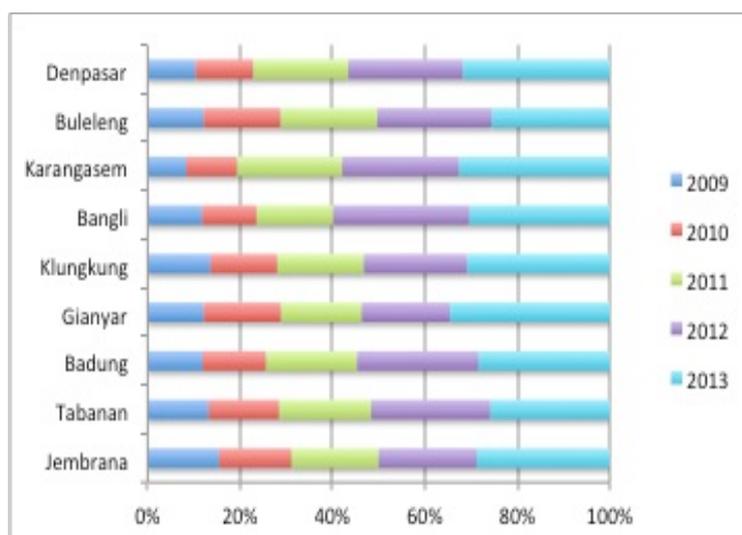
Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	33.952	34.380	40.529	46.470	68.485
Tabanan	93.840	116.860	141.046	183.295	225.394
Badung	850.163	979.241	1.406.259	1.870.187	2.279.113
Gianyar	112.380	153.617	209.360	253.248	319.612
Klungkung	27.665	30.990	34.724	39.843	59.152
Bangli	16.252	16.329	22.961	40.751	55.986
Karangasem	47.842	62.696	129.556	144.037	168.652
Buleleng	63.487	86.962	109.167	129.003	160.292
Denpasar	214.979	260.482	424.962	511.326	658.974

Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2009 – 2014

Berdasarkan Tabel 2, bahwa terjadinya PAD yang meningkat selama lima periode pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tahun 2013 Kabupaten Badung pada urutan pertama sebesar Rp 2.279.113 juta rupiah, disusul oleh Kota Denpasar sebesar Rp 658.974 juta rupiah dan terendah diraih oleh Kabupaten Bangli sebesar Rp 55.986 juta rupiah. Olatunji et al. (2009), mengatakan bahwa PAD merupakan sumber dalam pembiayaan belanja modal. Penelitian Liliana et al. (2011); Ogujiuba dan Abraham (2012), adanya korelasi antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Peningkatan PAD disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali pada periode 2009 – 2013 tercermin pada Gambar 2.

**Gambar 2**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**  
**periode 2009 – 2013.**



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2009 – 2014

Gambar 2 menunjukkan PAD yang meningkat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama lima periode dalam bentuk persen. Menurut Gugus (2013), PAD ialah sumber untuk menciptakan infrastruktur daerah. Darwanto dan Yustikasari (2007); Tuasikal (2008); Arwati dan Hadiati (2013), mengatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pariwisata adalah kunci keberhasilan dalam hal meningkatkan penerimaan daerah. (Salah, 2003:16), pariwisata berperan meningkatkan perekonomian suatu negara, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata akan membantu proses pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut Ekanayake and Aubrey

(2012), promosi potensi pariwisata merupakan strategi ampuh dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pulau Bali merupakan barometer pariwisata dengan keindahan alam dan keunikan budayanya. Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki potensi daerah wisata yang bervariasi, yaitu berupa perbukitan, pegunungan, persawahan dan pantai yang banyak digemari oleh wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata merupakan bagian penting dalam industri pariwisata. Menurut Spillane (1994:47), pariwisata memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi yaitu, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan. Menurut Jaka (2010), meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berperan kepada pembangunan daerah, yakni dalam pengalokasian belanja modal sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah menciptakan pelayanan publik. Ferry (2012), jumlah kunjungan wisatawan akan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan turut membantu dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Totok (2006), sistem transportasi, akomodasi, dan promosi yang baik akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur (jalan, air, pelabuhan dan bandara) merupakan komponen utama dalam menarik wisatawan (Seetanah and Sawtah, 2011). Secara lebih spesifik, infrastruktur transportasi akan meningkatkan pertumbuhan sektor wisata daerah, karena menciptakan konektivitas antara daerah

asal dengan tujuan wisata (Prideaux, 2000).

Sebagai destinasi pariwisata pulau Bali mewajibkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam setiap obyek wisatanya. Bertambahnya hotel dan restoran di berbagai daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali telah membuktikan perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Menurut Teori Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesobroto 1993;173), ialah analisis tentang penerimaan dalam pengeluaran pemerintah. Ketika pajak meningkat, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat dimana GNP yang meningkat pengeluaran pemerintah akan semakin besar. Teori ini tentang tingkat toleransi pajak, dalam hal ini masyarakat memahami betul betapa pentingnya pajak yang diperlukan oleh pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Teori ini terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yakni, dalam pengeluaran pemerintah ada gangguan sosial aktivitas swasta akan dialihkan ke aktivitas pemerintah. Gangguan ini akan berdampak pada pemerintah yang harus meminjam dana pada negara lain untuk membiayai hutang. Ketika gangguan sudah dapat diatasi maka akan muncul kewajiban pemerintah untuk pelunasan hutang serta membayar bunga kepada negara lain. Efek inspeksi (*inspection effect*) ialah gangguan yang akan muncul setelah mengalami peperangan. Efek konsentrasi (*concentration effect*) ialah gangguan sosial yang disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan dari swasta kepada pemerintah. Aktivitas pemerintah akan bertambah dalam ketiga efek tersebut dimana, setelah peperangan dapat diselesaikan tingkat pajak tidak akan dapat menurun kembali seperti sebelum peperangan terjadi (Mangkoesobroto 1993;173).

Dwi dan Elva (2012), pajak hotel dan restoran ialah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pajak dari pelayanan hotel dan restoran. Pajak ialah iuran wajib bagi rakyat untuk negara, yang nantinya akan turut membantu dalam pembiayaan pemerintah. Dalam pembangunan daerah pajak berperan penting, karena tanpa adanya dana pembangunan tidak bisa terpenuhi secara maksimal karena pendapatan negara kita terdiri dari pajak sebesar 75%. Maka dari itu, pajak harus ditangani secara tepat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Sianturi (2010), ada kaitan antara pajak daerah dan alokasi belanja modal. Semakin besar penerimaan pajak, semakin besar PAD. Penelitian – penelitian terdahulu, seperti Aziz et.al (2000); Doi (1998), pajak berpengaruh terhadap anggaran belanja pemerintah daerah.

McGowan (1983), pajak mempunyai pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Dwi dan Elva (2012), yang menyatakan alokasi belanja daerah dipengaruhi oleh pajak daerah pada Kabupaten Madiun. Menurut Rudiansyah (2003), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah berwenang mengalokasikan pendapatan daerah, baik dalam sektor belanja langsung maupun belanja modal.

Dari paparan di atas, penelitian ini mengkaji sejauh mana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan PAD terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009 – 2013, mengingat perkembangan

pariwisata yang begitu pesat serta bertambahnya hotel restoran dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang, terdapat rumusan masalah yakni, (a) Bagaimana pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (b) Bagaimana pengaruh langsung pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (c) Bagaimana pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (d) Bagaimana pengaruh langsung pajak hotel dan restoran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (e) Bagaimana pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (f) Bagaimana pengaruh tidak langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (g) Bagaimana pengaruh tidak langsung pajak hotel dan restoran terhadap Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni (a) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (b) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (c) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan

terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (d) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung pajak hotel dan restoran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (e) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (f) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tidak langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013, (g) Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tidak langsung pajak hotel dan restoran terhadap Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009-2013.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi wadah bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan mampu mengaplikasikan teori-teori ekonomi pembangunan diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang bermanfaat menambah referensi tentang belanja modal. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat memberikan saran kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan percontohan dalam sektor pariwisata dan peningkatan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, menurut Rostow dan Musgrave (dalam Mangkoesoebroto 1993:169), menyatakan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut dalam pembangunan ekonomi. Tahap awal ialah awal adanya

perkembangan ekonomi, dimana investasi pemerintah kepada total investasi jumlahnya sangat besar karena untuk menyediakan fasilitas serta pelayanan publik yang memadai. Tahap menengah ialah adanya pembangunan ekonomi, dimana masih memerlukan investasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dalam tahap ini investasi swasta yang memiliki peran yang sangat besar. Kemudian, terakhir pada tahap lanjut, aktivitas kegiatan pemerintah yang sebelumnya mengenai persediaan prasarana akan dialihkan untuk pengeluaran dalam bentuk aktivitas sosial bagi kesejahteraan masyarakat (Mangkoesobroto, 1993:170).

Menurut Mangkoesobroto (1993:171), Hukum Adolf Wagner menyatakan apabila pendapatan perkapita meningkat maka, akan terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Teori Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesobroto 1993;173), ialah analisis tentang penerimaan dalam pengeluaran pemerintah. Ketika pajak meningkat, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat dimana GNP yang meningkat pengeluaran pemerintah akan semakin besar. Teori ini tentang tingkat toleransi pajak, dalam hal ini masyarakat memahami betul betapa pentingnya pajak yang diperlukan oleh pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Teori ini terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yakni, dalam pengeluaran pemerintah ada gangguan sosial aktivitas swasta akan dialihkan ke aktivitas pemerintah. Gangguan ini akan berdampak pada pemerintah yang harus meminjam dana pada negara lain untuk membiayai hutang. Ketika gangguan sudah dapat diatasi maka akan muncul kewajiban pemerintah untuk pelunasan hutang serta membayar bunga kepada

negara lain. Efek inspeksi (*inspection effect*) ialah gangguan yang akan muncul setelah mengalami peperangan. Efek konsentrasi (*concentration effect*) ialah a gangguan sosial yang disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan dari swasta kepada pemerintah. Aktivitas pemerintah akan bertambah dalam ketiga efek tersebut dimana, setelah peperangan dapat diselesaikan tingkat pajak tidak akan dapat menurun kembali seperti sebelum peperangan terjadi (Mangkoesobroto 1993;173).

## **METODE PENELITIAN**

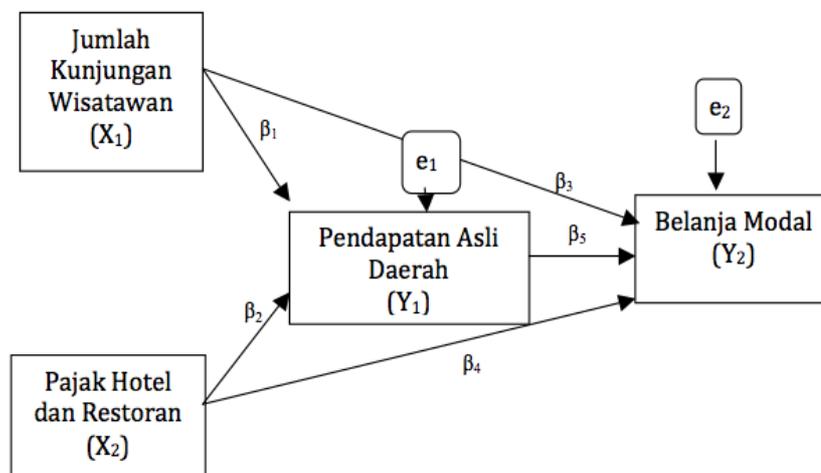
Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, sebab menggunakan prosedur-prosedur statistik dari kualifikasi (Rahyuda,dkk 2004:7). Lokasi penelitian ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, karena masing-masing daerah memiliki potensi daerah yang dikembangkan, meningkatnya kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan Pendapatan Asli Daerah, maka pengalokasian belanja modal akan secara maksimal dilakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana fasilitas di daerahnya. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada bidang perencanaan pembangunan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Objek penelitian adalah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran, Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009 - 2013.

Populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, dimana hanya untuk data periode 2009-

2013. Sampel yang digunakan adalah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2009 - 2013.

Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan, yakni memahami, mencatat, dan mempelajari uraian dari buku-buku, karya ilmiah seperti skripsi, artikel dan dokumen. Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Bali, Dinas Pendapatan Bali dan Badan Pusat Statistik Bali. Metode analisis jalur (*Path Analysis*) adalah perluasan analisis regresi linier berganda, yang digunakan mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening dengan uji sobel (Suyana, 2012:156).

**Gambar 3**  
**Model Analisis Jalur**



Persamaan struktural dalam gambar 3 yakni :

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

$Y_2$  = Belanja modal

$Y_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_1$  = Jumlah kunjungan wisatawan

$X_2$  = Pajak hotel dan restoran

$\beta_1 \dots \beta_5$  = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

$e_1, e_2$  = *Error term*

Gambar 3 menunjukkan hubungan substruktural, yang pertama ialah hubungan kausal dari  $X_1$ ,  $X_2$ , ke  $Y_1$ . Hubungan substruktural kedua ialah hubungan kausal dari  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y_1$  ke  $Y_2$ . Anak panah  $e_1$  menuju Pendapatan Asli Daerah ( $Y_1$ ) ialah jumlah *variance* yang tidak dijelaskan oleh jumlah kunjungan wisatawan ( $X_1$ ) dan pajak hotel dan restoran ( $X_2$ ) dan anak panah  $e_2$  menuju belanja modal ( $Y_2$ ) ialah jumlah *variance* belanja modal yang tidak dijelaskan oleh variabel jumlah kunjungan wisatawan ( $X_1$ ), pajak hotel dan restoran ( $X_2$ ) dan belanja modal ( $Y_1$ ).

Pengujian pengaruh tidak langsung menggunakan uji sobel dalam menguji pengaruh tidak langsung antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y2) melalui variabel intervening (Y1).

$$Z = \frac{ab}{Sab}$$

$$Sab = \sqrt{a^2 + Sb^2 + b^2Sa^2}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yaitu menguji pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah, pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, (b) Pengaruh tidak langsung variabel kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran terhadap belanja modal melalui variabel pendapatan asli daerah, yang diuji dengan menggunakan uji Sobel. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat di bawah ini yaitu di Tabel 3.

### Pengaruh Langsung

Hasil dari pengujian pada Tabel 3 yang menunjukkan pengaruh langsung jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, *standardized coefficient beta* 0,740 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dari nilai probabilitas ( $\alpha=0,05$ ).

**Tabel 3**  
**Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel**

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	t Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0,740	0,000	7,961	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,208	0,000	2,237	0,031	Signifikan
X1 → Y2	-1,072	0,000	-5,340	0,000	Signifikan
X2 → Y2	-0,290	0,000	-2,163	0,036	Signifikan
Y1 → Y2	1,671	0,158	7,943	0,000	Signifikan

*Sumber:* Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah, signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hubungan signifikan jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD sesuai dengan penelitian Lia (2013), menyatakan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dan adanya fasilitas pariwisata akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga penerimaan daerah akan bertambah. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi pariwisata guna memikat perhatian wisatawan untuk berkunjung yang nantinya akan turut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan sektor pariwisata. Penelitian Dewi (2015), pendapatan sektor pariwisata dipengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Artinya semakin meningkat jumlah kunjungan wisatawan akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh besar terhadap

pendapatan asli daerah yang nantinya akan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.

Pajak hotel restoran mempunyai pengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah, yakni  $0,000 < 0,05$ . Hal ini sesuai dengan Sadono (2002:181), Kontribusi pajak berpengaruh terhadap besar kecilnya PAD. Menurut Marteen, et al (2001) dan Robert (2002), sektor pajak daerah dan retribusi berkontribusi besar terhadap PAD, dalam hal ini pemerintah daerah yang mengelola. Pemerintah Daerah diharapkan tegas dalam pemungutan pajak baik pajak hotel restoran, maupun pajak lainnya mengingat pajak ialah termasuk komponen utama dalam PAD. Penelitian Suartini (2013), menyatakan jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991 -2010. Nilai koefisien regresi menunjukkan variabel PHR tertinggi, maka PHR memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Gianyar.

Hasil pengujian Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dengan nilai signifikansi yaitu  $0,000 < 0,05$  berpengaruh langsung terhadap belanja modal. Hubungan signifikan jumlah kunjungan wisatawan terhadap belanja modal sesuai dengan penelitian Jaka (2010), banyaknya wisatawan berkunjung, akan meningkatkan pendapatan daerah, sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah termasuk belanja modal, sehingga akan menciptakan pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Ferry (2012), banyaknya jumlah kunjungan wisatawan

akan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan turut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Totok (2006), menyatakan semakin unik dan menarik objek wisata maka, akan semakin banyak wisatawan berkunjung, apalagi jika ditunjang dengan sistem transportasi, akomodasi, dan promosi yang baik. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur (jalan, air, pelabuhan dan bandara) merupakan komponen utama dalam menarik wisatawan (Seetanah and Sawtah, 2011). Secara lebih spesifik, infrastruktur transportasi akan meningkatkan pertumbuhan sektor wisata daerah, karena menciptakan konektivitas antara daerah asal dengan tujuan wisata (Prideaux, 2000).

Pajak hotel restoran mempunyai pengaruh langsung terhadap belanja modal. yakni,  $0,036 < 0,05$ . Hubungan signifikan pajak hotel restoran terhadap belanja modal sesuai dengan penelitian Sianturi (2010), yakni kaitan antara pajak daerah dan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak, maka semakin besar PAD. Pemerintah daerah berwenang dalam pengalokasian pendapatan baik sektor belanja langsung maupun belanja modal. Penelitian oleh Dwi dan Elva (2012), menyatakan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun. Hubungan signifikan pajak hotel restoran terhadap belanja modal sesuai dengan Menurut Teori Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesobroto 1993;173), ialah analisis tentang penerimaan dalam pengeluaran pemerintah. Ketika pajak meningkat, pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat dimana GNP yang meningkat pengeluaran pemerintah akan

semakin besar. Teori ini tentang tingkat toleransi pajak, dalam hal ini masyarakat memahami betul betapa pentingnya pajak yang diperlukan oleh pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Teori ini terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yakni, dalam pengeluaran pemerintah ada gangguan sosial aktivitas swasta akan dialihkan ke aktivitas pemerintah. Gangguan ini akan berdampak pada pemerintah yang harus meminjam dana pada negara lain untuk membiayai hutang. Ketika gangguan sudah dapat diatasi maka akan muncul kewajiban pemerintah untuk pelunasan hutang serta membayar bunga kepada negara lain. Efek inspeksi (*inspection effect*) ialah gangguan yang akan muncul setelah mengalami peperangan. Efek konsentrasi (*concentration effect*) ialah a gangguan sosial yang disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan dari swasta kepada pemerintah. Aktivitas pemerintah akan bertambah dalam ketiga efek tersebut dimana, setelah peperangan dapat diselesaikan tingkat pajak tidak akan dapat menurun kembali seperti sebelum peperangan terjadi (Mangkoesobroto 1993;173). Penelitian – penelitian terdahulu, seperti Aziz et.al (2000); Doi (1998), pajak dapat mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah daerah. McGowan (1983), besar kecilnya pajak memiliki pengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah. Dwi dan Elva (2012), pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Madiun. Pajak hotel dan restoran ialah bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pajak dari pelayanan hotel dan restoran. Pajak ialah iuran wajib bagi rakyat untuk negara, yang antinya akan turut membantu dalam pembiayaan pemerintah. Dalam pembangunan daerah pajak berperan penting, karena tanpa adanya dana pembangunan tidak bisa

terpenuhi secara maksimal karena pendapatan negara kita terdiri dari pajak sebesar 75%. Maka dari itu, pajak harus ditangani secara tepat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Rudiansyah (2003), menyatakan bahwa pajak daerah terhadap belanja daerah masih fluktuatif. Hal ini karena, masih kurang tegasnya pemerintah dalam pemugutan pajak, padahal pemerintah memerlukan dana untuk pelayanan publik yang salah satunya bersumber dari pajak itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh langsung terhadap belanja modal, yakni  $0,000 < 0,05$ . Hal ini sesuai dengan Hukum Wagner, yakni ketika pendapatan perkapita meningkat akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kartika dan Dwirandra (2014), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah. Alokasi belanja modal akan membiayai aset tetap pemerintah daerah. Ketika pembangunan ekonomi daerah meningkat, belanja modal akan ditingkatkan untuk memperbaiki atau melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana agar pembangunan ekonomi tercapai dengan baik. Semakin besar PAD maka pengalokasian belanja modal akan semakin besar (Ardhani 2011). Olatunji et al. (2009), PAD merupakan tulang punggung dalam pembiayaan belanja modal.

Menurut Gugus (2013), menyatakan PAD dapat menciptakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah seharusnya bisa menggali dan mengelola potensi daerah sebagai sumber pembiayaan untuk menciptakan infrastruktur daerah.

Olatunji et al. (2009), mengatakan bahwa PAD merupakan sumber dalam pembiayaan belanja modal. Tuasikal (2008), PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Segala pengeluaran Pemerintah Daerah di Indonesia dicerminkan pada APBD, artinya apabila PAD meningkat, maka belanja modal meningkat.

Penelitian Liliana et al. (2011); Ogujiuba dan Abraham (2012), adanya korelasi antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Darwanto dan Yustikasari (2007); Arwati dan Hadiati (2013), mengatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Solikin (2008), belanja modal dipengaruhi oleh PAD. Namun, belanja modal sepenuhnya belum dapat menciptakan kesejahteraan publik, karena kurang terorientasinya pengelolaan belanja modal setiap daerah. Halim dan Abdullah (2006), menilai alokasi belanja modal tidak dapat berjalan dengan baik akibat masih adanya kepentingan golongan yang bermain didalamnya. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih transparan dalam pengalokasian belanja modal agar realisasi belanja modal kepada masyarakat tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui nilai  $e_1$ , jumlah *variance* Pendapatan Asli Daerah yang tidak dijelaskan oleh jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran, dihitung menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R_i^2}$$
$$= \sqrt{1 - 0,792}$$

$$= 0,456$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan *variance* variabel belanja modal yang tidak dijelaskan oleh jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran, maka dihitung menggunakan rumus :

$$e_2 = \sqrt{1 - R_i^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,623}$$

$$= 0,614$$

Penggunaan indikator koefisien determinasi total berfungsi untuk menguji validitas model:

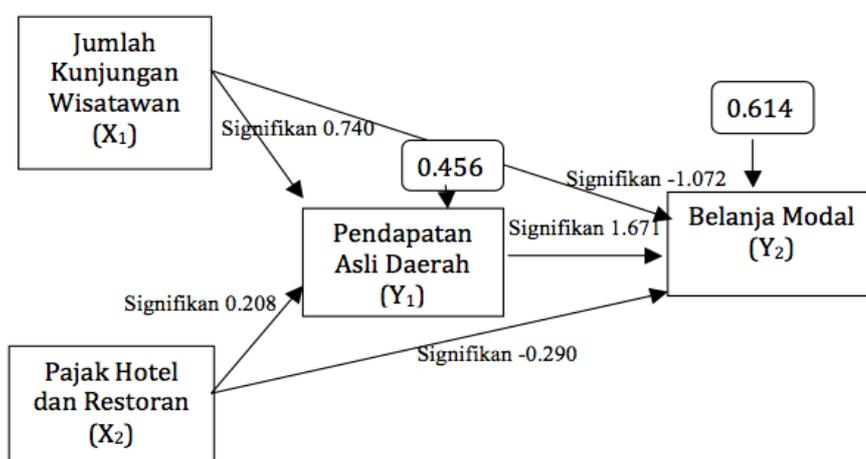
$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,456)^2 - (0,614)^2 \\ &= 0,922 \end{aligned}$$

Keterangan :

$R_m^2$  : Koefisien determinasi total  
 $e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan taksiran standar

Hasil perhitungan koefisien determinasi total, menyimpulkan keragaman data yang dijelaskan oleh model yakni sebesar 92,2 persen, sedangkan sisanya yakni 7,8 persen dijelaskan oleh variabel lain tidak terdapat dalam model.

**Gambar 4**  
**Hasil Analisis Jalur**



Sumber : Tabel 3

Berdasarkan hasil analisis data pada Gambar 4 menunjukkan, nilai  $\beta$  ( $X_1Y_1$ ) sebesar 0,740, nilai  $\beta$  ( $X_1Y_2$ ) sebesar -1,072, nilai  $\beta$  ( $X_2Y_1$ ) sebesar 0,208, nilai  $\beta$  ( $X_2Y_2$ ) sebesar -0,290, dan nilai  $\beta$  ( $Y_1Y_2$ ) sebesar 1,671. Nilai kekeliruan taksiran standar  $e_1$  sebesar 0.456 dan  $e_2$  sebesar 0.614.

### Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian pengaruh tidak langsung jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran terhadap belanja modal melalui pendapatan asli daerah dilihat melalui nilai z dari koefisien  $\beta$ , yang diperoleh dengan menghitung nilai S terlebih dahulu.

**Tabel 4**  
**Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung**

Pengaruh Antarvariabel	ab	Sab	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	0,117	10,569	Signifikan
X2 → Y2	Y1	0,033	10,532	Signifikan

*Sumber:* Data diolah, 2015

Berdasarkan dari Tabel 4, secara absolut Z hitung sebesar  $10,569 > 1,64$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pendapatan asli daerah ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening pada jumlah kunjungan wisatawan ( $X_1$ ) terhadap belanja modal ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dengan kata lain jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh secara tidak langsung terhadap belanja modal melalui pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4, secara absolut Z hitung sebesar  $10,532 > 1,64$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya pendapatan asli daerah ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening pajak hotel restoran ( $X_2$ ) terhadap belanja modal ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dengan kata lain pajak hotel restoran secara tidak langsung terhadap belanja modal melalui pendapatan asli daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh tidak langsung terhadap belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,117, mempunyai arti bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh tidak langsung terhadap belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,7 persen. Nilai pengaruh tidak langsung pajak hotel restoran terhadap belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,033, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung pajak hotel

restoran terhadap belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,3 persen.

Secara langsung variabel independen berpengaruh sangat nyata terhadap variabel mediasi dan variabel mediasi berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen, maka keadaan pada hasil penelitian ini merupakan *partial mediation*.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. (a) Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti, setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (b) Pajak hotel restoran memiliki berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti, setiap peningkatan pajak hotel restoran akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (c) Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh langsung terhadap belanja modal yang berarti, setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan meningkatkan belanja modal, (d) Pajak hotel restoran berpengaruh langsung terhadap belanja modal yang berarti, setiap peningkatan pajak hotel restoran akan meningkatkan belanja modal, (e) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap belanja modal yang berarti, setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan belanja modal, (f) Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap belanja modal melalui Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel intervening, (g) Pajak hotel restoran memiliki pengaruh tidak langsung terhadap belanja modal melalui

Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel intervening.

Saran yang dapat disampaikan, yakni (a) Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pengalokasian belanja modal, maka Pemerintah daerah sebaiknya menggali dan mengoptimalkan potensi daerah demi menciptakan kemandirian daerah, sehingga mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. (b) Pemerintah Daerah sebaiknya lebih memprioritaskan dan meningkatkan belanja modal daripada belanja daerah lainnya. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih selektif, obyektif dan transparan dalam penggunaan belanja modal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang memihak kepada kepentingan umum, sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang memadai demi kesejahteraan masyarakat. (c) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel restoran sangat diperlukan dalam meningkatkan belanja modal. Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan cara menggali potensi obyek wisata daerah dan Pemerintah Daerah sebaiknya tegas dalam pemungutan pajak hotel restoran.

## REFERENSI

- Abimanyu, Anggito. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. *e-jurnal Akuntansi*. 08(2):h:416-424.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam. Banda Aceh.

- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W. N. W. Azman -Saini, & M. Azali. 2000. The Causal Relationship between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. *International Journal of Business and Finance Research*. 3(1): pp:63-73.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2007*. Perwakilan BPK RI. Bandung
- Badan Pusat Statistik Bali. 2009. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- . 2010. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- . 2011. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- . 2012. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- . 2013. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- . 2014. *Statistic of Bali, Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *e-article Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar 26-28 Juli 2007.
- Dewi, Udayantini. 2015. Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013. *Skripsi*. Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2013. *Bali Tourism Statistic 2013. Statistik Pariwisata Bali 2013*. Denpasar.

Dinas Pendapatan Provinsi Bali. 2009. Denpasar

----- . 2010. Denpasar

----- . 2011. Denpasar

----- . 2012. Denpasar

----- . 2013. Denpasar

Doi, Takero. 1998. *Is Japanese Local Finance Really Centralized? From Viewpoint of The Revenue-Expenditure Nexus*. 19(8): pp:265-275.

Dwi, Handayani dan Nuraini, Elva. 2012. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun. Jawa Timur.

Ekanayake and Aubrey E. Long. 2012. Tourism Development and Economic Growth In Developing Countries. *The International Journal of Business and Finance Research*. 6(1): pp: 61-63.

Felix, Olurankinse. 2012. Analysis Of The Effectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*. 4(1): pp:1-6.

Ferry, Pleanggra. 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Diponogoro Journal of Economics*. 1(1) h:1-8.

Gugus, Arbhie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Semarang

Halim, Abdul dan Sukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(2):h:17-32.

Hariyanto, dan Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan PerKapita. *e-article Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar 26-28 Juli 2007.

- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria : Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*. 2(3): pp: 718-723.
- Jaka, Winarna. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal of Rural and Development*. 1(2): h:35-45.
- Jones, Stewart and Walker, R.G. 1983. Explanators of Local Government Distress. *International Journal of Public Administration*. 43(3): pp:396-418.
- Kartika, Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Denpasar.
- Koswara, E., 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. *e-jurnal Ekonomi*. 29(1): h:36.
- Lia, Ardiani Widyanigrum. 2013. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Liliana, B., Diana, M., and Carmen, C. 2011. Is There Correlation Between Government Expenditure, Population, Money Supply and Government Revenue? *International Journal of Arts and Science*. 4(12): pp:241-254
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization And Economic Growth In China*. *Journal of Economic Development And Cultural Change*. 49(1): pp:263-275.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development of Journal*. 45(4): pp:845-854.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajaemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Marteen, et all. 2001. Partisan Influence On The Local Tax Burden In The Netherland. Public Choise. *Journal of Economics*. 10(6): pp:351-363.

- McGowan, J.J. 1983. On the Misuse of Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Profits. *Journal of American Economic*. 73(4): pp:82-97.
- Media Indonesia. 2008. Menggenjot Belanja Modal. <http://www.media-indonesia.com>. Diunduh 25 Agustus 2008.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terta W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*. 4(11): pp:172-182.
- OkeZone.com. 2012. Belanja modal pemerintah masih kecil. <http://news.okezone.com/read/2012/03/30/452/602357/belanja-modal-pemerintah-masih-kecil>. Diunduh Jumat. 30 Maret 2012 - 08:46 WIB.
- Olatunji, O.C., O.Asalu Taiwo and J.O Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*. 3(3): pp:54-60.
- Prideaux, L., Creed, P., Muller, J., & Patton, W. (2000). A Review Of Career Interventions: Have Investigations Shed Any Light? *Journal of Psychology*. 59(4): pp:227-239.
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodelogi Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Denpasar.
- Robert A Simanjuntak. 2002. Evaluation Criteria an the Efforts to Increase Local Tax Base A Case Study of Indonesia Decentralizing Era. *Journal of Georgia State University*. 2(3): pp:211-265.
- Rudiansyah, Mohammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Makara Sosial Humainora*. 7(2): h:49-57.
- Sadono, Sukirno. 2002. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. UI-Press. Jakarta.
- Salah, Wahab. 2003. *Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja*. PT. Pertja. Jakarta.
- Seetanah, Boopen and Sawkut Rojid. 2011. Analysing the Sources of Economic Growth in Africa Using Growth a Accounting and a Panel VAR approach.

*The Journal of Developing Areas*. 44(2): pp:367-390.

Sianturi, Agave. 2010. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara . *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Solikin, Ikin.2008. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(2): h:1-12.

Spillane, James J 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.

Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response To Federal Aid Symetrical? Evidence- From Pensylvania Country Government In An Era Of Retrenchment. *National Tax Journal*. 47(4): pp:799-816.

Suartini . 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991-2010. *e-jurnal Akuntansi*. 2(3): h:209-220.

Sugiyono. 2013. *Stastitik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Suyana, Utama. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar

Totok, Sarsito. 2006. Pengembangan Kebudayaan Daerah di Era Kemajuan di Bidang Kepariwisataaan. *e-Jurnal Dinamika Kebudayaan*. 8(2): h:67-71.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *e-Jurnal telaah & Riset Akuntansi*. 1(2): h:142-155.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Wong, Jhon D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 16(3): pp: 413-423.